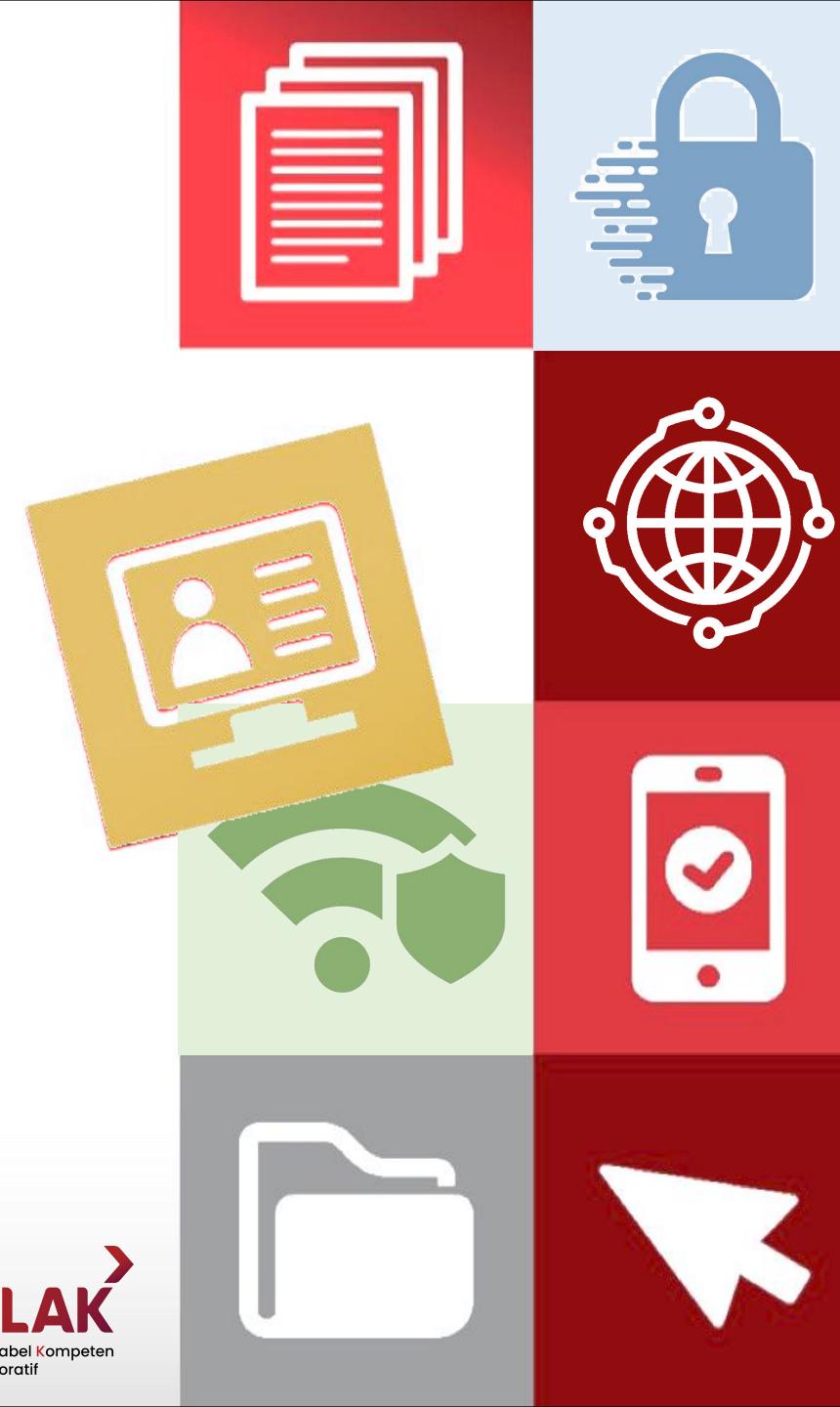




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAHAN DIGITAL untuk Indonesia Maju



ARSITEKTUR SPBE* MENOPANG REFORMASI BIROKRASI TEMATIK



panrb

KEMENTERIAN
PENYOOGUNAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

BerAKHLAK[®]
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RB PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya, **termasuk stunting**. Peluncuran pilot project pada 3 provinsi dan 9 kab/kota pada 21 Oktober 2022. Mulai 2023, program RB Penanggulangan Kemiskinan masuk dalam evaluasi Indeks RB seluruh pemda.



RB PENINGKATAN INVESTASI

Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi **penghitungan indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda**.



RB PERCEPATAN PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN

Tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Contoh: **penanganan inflasi, percepatan produk dalam negeri melalui e-katalog, dsb.**



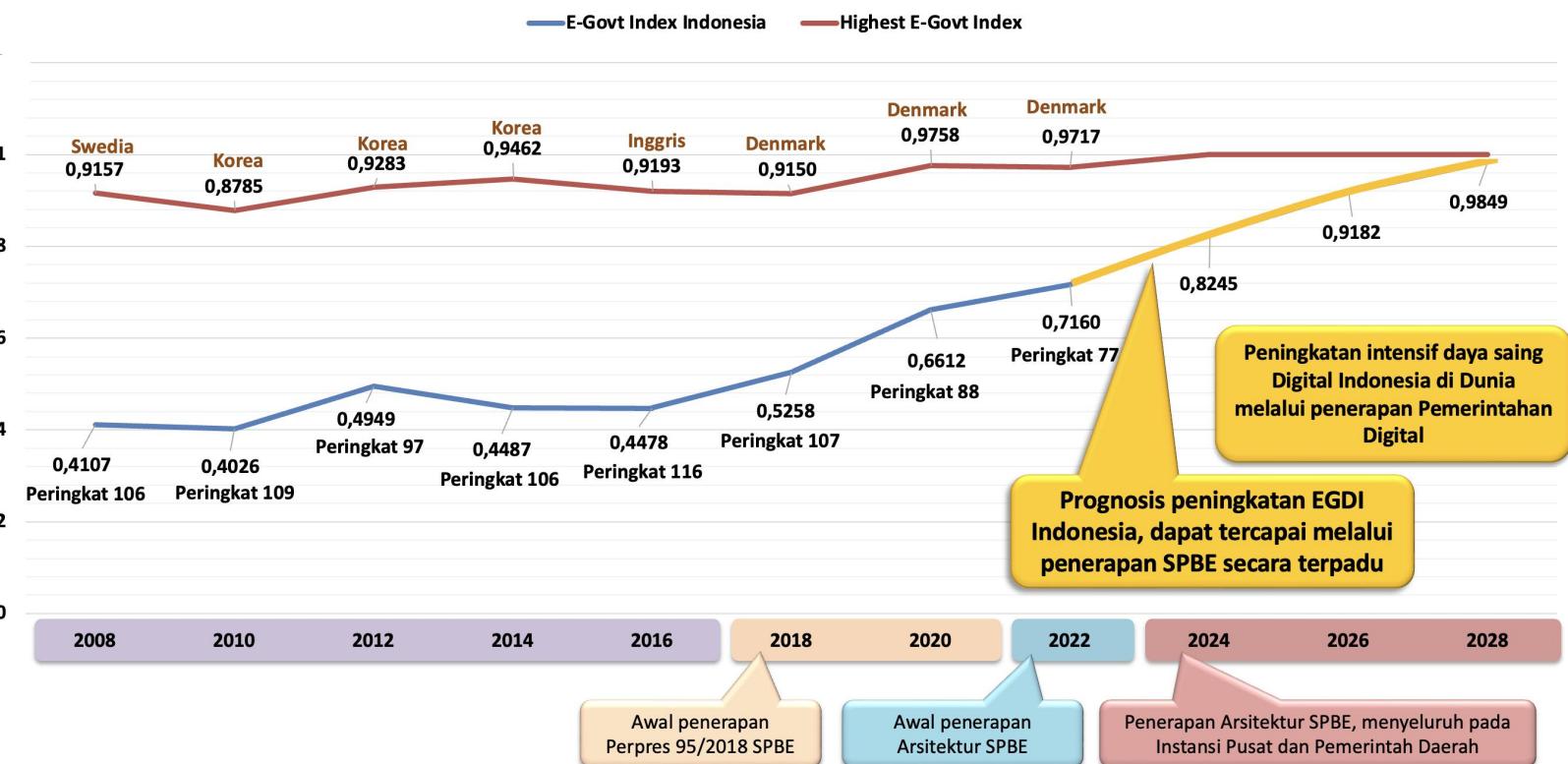
RB DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Digitalisasi berbasis Arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.

5 DAMPAK PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DALAM KERANGKA SPBE:

1. Peningkatan e-Government Development Index (EGDI), Capai Level Tertinggi 2028, Diukur oleh PBB



2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemberantasan Korupsi

4. Efisiensi Belanja TIK Nasional, melalui Pemanfaatan Infrastruktur TIK Berbagi Pakai (Pusat Data Nasional)

5. Peningkatan capaian GovTech Maturity Index (GTMI) oleh Indonesia, pengukuran oleh World Bank pada Lembaga pemerintah dalam menerapkan inovasi teknologi terbaru



PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

REKOMENDASI KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (KPRBN)

1

PEMBANGUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (RB TEMATIK)

2

**PERCEPATAN MAM PELAYANAN PUBLIK
DAN MAM PELAYANAN PUBLIK DIGITAL**

3

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH

4

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

5

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK